RENCANA KERJA TAHUN 2023 BPPHLHK WILAYAH SULAWESI

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini memuat berbagai upaya serta keberhasilan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, yang selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dapat lebih terarah yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup da Kehutanan di Tahun 2023. Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Desember 2022

Kepala Balai,

Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dokumen RENJA ini turut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Tahun 2023 dimana mencakup sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dodi Kurniawan, S. PT., M.H.

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Penjelasan Umum RENJA BPPHLHK Wilayah Sulawesi ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi terutama harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Bagi Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi yang terkait langsung dengan pencapaian Prioritas Nasional pada tahun 2023, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas yang telah ditetapkan.

B.Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
c. sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
d. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
e. pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
f. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
g. pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
h. pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
i. fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
j. pengawasan penaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
l. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

C.Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022, berikut bagan struktur organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK).

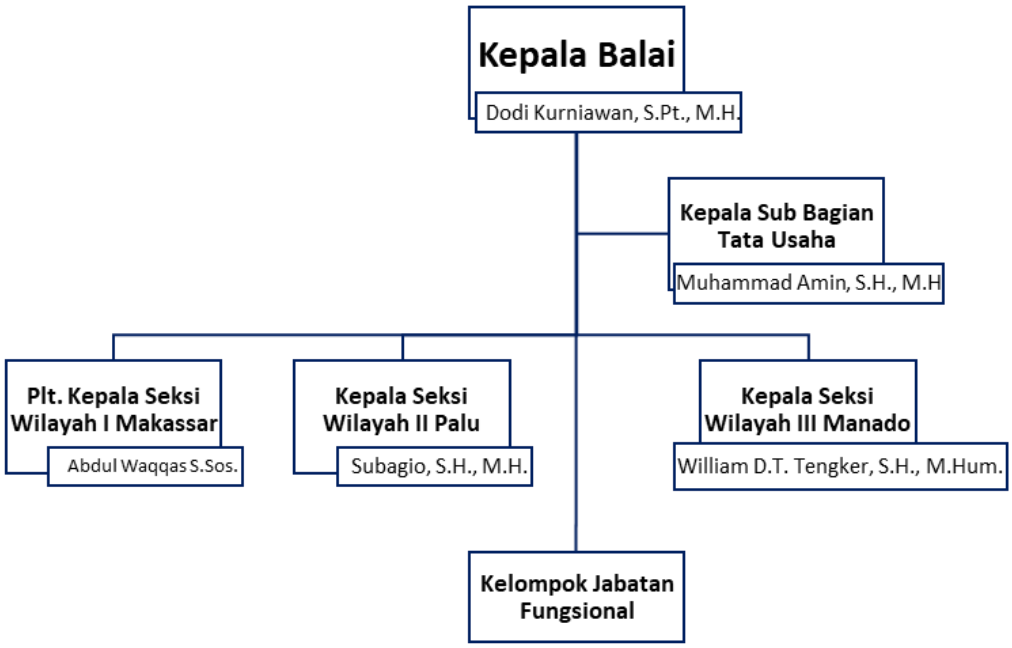

Dodi Kurniawan, S. PT., M.H.

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Muhammad Amin, S.H., M.H.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Abdul Waqqas S.Sos.

Plt. Kepala Seksi Wilayah I

Subagio, S.H., M.H.

Kepala Seksi Wilayah II Palu

William D.T. Tengker, S.H., M.Hum.

Kepala Seksi Wilayah III Manado

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Per Desember 2022 tercatat sebanyak 185 Orang (PNS, CPNS dan PPNPN) dengan rincian :

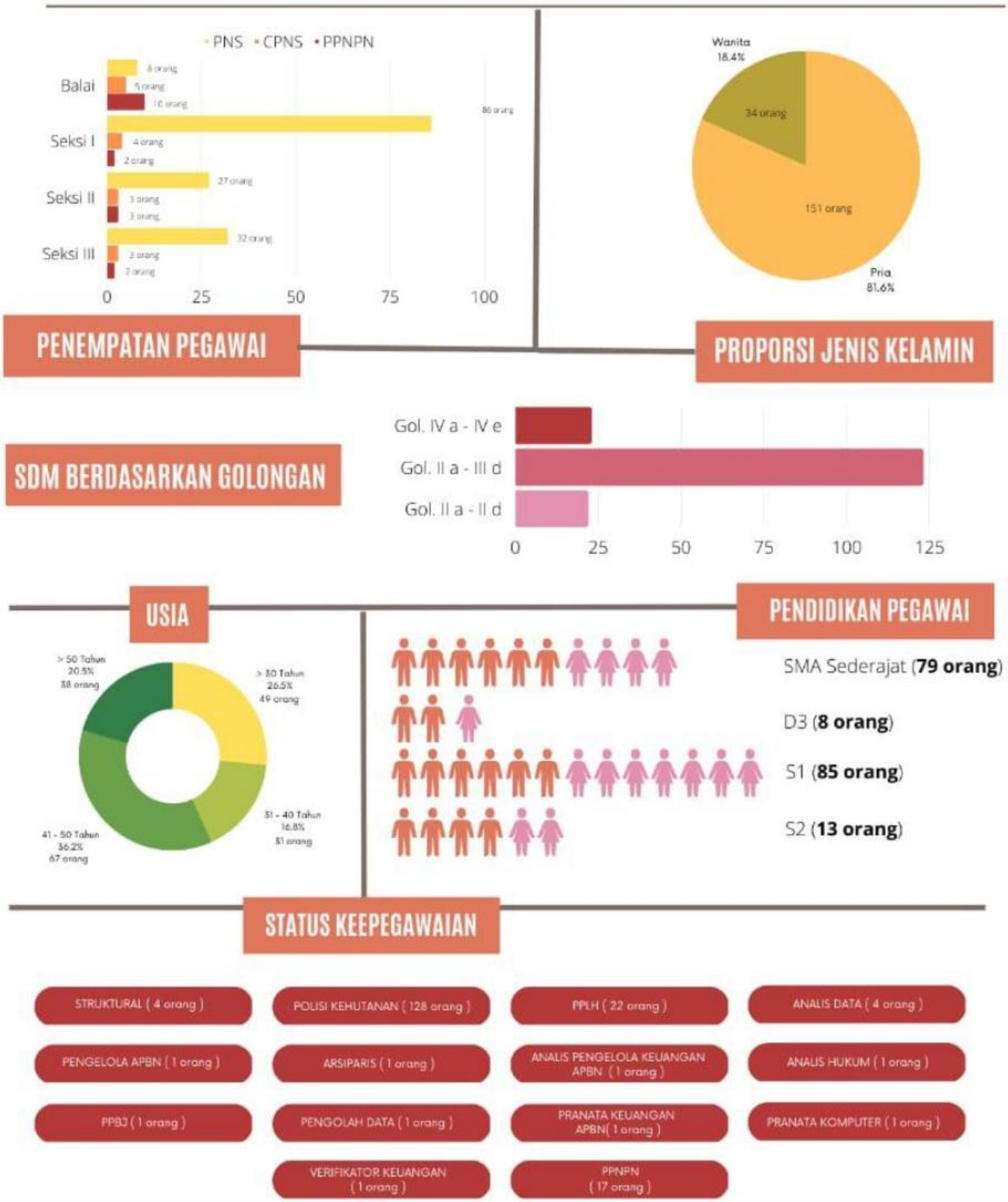

E. Sarana Prasarana

Untuk mendukung kinerja sumber daya manusianya, sarana dan prasarana yang andal sesuai dengan kebutuhan dan fungsi harus dipenuhi. Sebab, sarana dan prasarana yang tepat guna akan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu pelaksanaan tugas. Seperti yang dijabarkan data dibawah, berikut beberapa sarana prasarana untuk mendukung tugas aparat dilapangan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyediakan 411 sarana prasarana berbagai jenis. Berikut merupakan rincian sarana prasarana lapangan :

No	Nama Barang	Total Harga Perolehan	Total Unit
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.836.301.536	2
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12.055.442.467	2
3	Gedung Pos Jaga Permanen	219.531.500	1
4	Spy Hidden Camera	19.400.000	12
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1.718.297.104	5
6	Pick Up (mobil Patroli / Double Cabin)	8.103.300.000	22
7	Sepeda Motor	864.803.397	38
8	Sepeda Motor Patroli	726.731.000	23
9	Mobil Unit Tahanan	700.000.000	1
10	Handy Cam	24.093.960	5
11	Voice Recorder	5.000.000	5
12	Camera Digital	129.074.780	24
13	Handy Talky (HT)	98.052.180	34
14	Senjata Genggam Lainnya	38.905.500	1
15	Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya	1.326.000.000	38
16	Drone	207.773.200	7
17	GPS	120.884.316	16
18	Lap Top	1.418.973.668	86
19	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	233.787.800	12
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	230.032.300	77
Jumlah		**33.076.384.708**	**411**

F. Pengarusutamaan Gender

Komitmen Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengupayakan Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah jargon atau cita-cita semata. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan para pengambil keputusan dalam jajaran Ditjen Gakkum KLHK telah menerapkan PUG dalam tugas utama dan fungsi setiap unit. Komitmen ini diatur dalam semua peraturan dan ketentuan internal, serta pembentukan unit kerja pengarusutamaan gender. Panduan dan bimbingan untuk mengimplementasikan PUG didukung dengan baik oleh Kementerian Negara Perempuan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KNPPA). Dukungan ini menggunakan standar alat PUG seperti penganggaran berbasis gender dan Gender Analysis Pathway (GAP). Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulewesi sebagai Unit Pelaksana Teknis didaerah juha mendukung penuh Pengarusutamaan Gender. Hal ini kami buktikan dengan adanya fasilitas/ sarana : ruang laktasi, ruang ramah anak, terpilahnya sarana umum WC dan Mushalla dan sarana lainnya.

Melalui kajian gender yang telah dilakukan oleh Ditjen Gakkum KLHK dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, beberapa hal perlu menjadi perhatian terkait PUG antara lain :

a) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman staf penegakhukum Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi terkait nilai-nilai kesetaraan gender di lingkungan kerja, termasuk tentang pemenuhan hak perempuan dan laki-laki, praktik-praktik non-diskriminasi gender, serta aspek perlindungan dari segala bentuk pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender (KBG) di tempat kerja. Pembuatan modul-modul pelatihan dapat menjadi alat dukung yang dapat digunakan secara terus-menerus oleh Ditjen Gakkum KLHK dalam meningkatkan kesadaran staf terhadap nilai-nilai kesetaraan gender dan pencegahan KBG di tempat kerja. Mekanisme peningkatan kapasitas yang dilakukan secara teratur/berkala kepada staff akan memberikan manfaat baikbagi proses terbentuknya Ditjen Gakkum KLHK sebagailembaga yang sensitif/responsif gender.
b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi dalam menjamin pemenuhan *practical gender concerns*, membuat kebijakan yang sensitif gender, serta dapat mengakomodasi mekanisme pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang mungkin dialami oleh staf di tempat kerja

c) Pelembagaan komitmen organisasi Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi untuk mempromosikan kesetaraan gender perlu semakin diperkuat dan dimantapkan, misalnya dengan melakukan kaderisasi Sub-POKJA PUG. Keberadaan aktivitas, program, serta pendanaan pada tiap tahun berjalan menjadi penting untuk mendukung implementasi PUG.

d) Menggunakan data terpilah berbasis jenis kelamin yang telah dimiliki oleh Ditjen Gakkum KLHK dan Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi untuk melakukan analisis kebutuhan gender dan mengidentifikasi persoalan-persoalan gender yang muncul di lingkungan kerja Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi. Selain itu, analisis data terpilah ini dapat digunakan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi performa kelembagaan, khususnya dalam mempromosikankesetaraan gender.

e) Organisasi yang sensitif gender akan mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Keberadaan modul-modul pembelajaran tentang penanganan kasus yang sensitif gender, prosedur investigasi lokasi berbahaya yang memperhatikan kebutuhan gender, dan sensitivitas gender pada bidang-bidang kerja Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi lainnya, yang ditujukan kepada semua staf terkait, akan sangat membantu akuntabilitas gender dari hasil program dan kebijakan kerja Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi. Program peningkatan kapasitas staf yang sistematis dan berkala dalam hal ini akan sangat membantu.

f) Pembuatan kerangka kerja gender dengan durasi, sasaran, anggaran, dan strategi yang jelas akan membantu proses implementasi PUG dalam penegakan hukum lingkungan di bawah Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi. Kerangka kerja dapat dibuat dalam jangka waktu lima tahun (rencana jangka menengah) dan jangka panjang dengan indikator pencapaian yang dapat diukur serta sesuai dengan kebutuhan Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi.

G. Reformasi Birokrasi BPPHLHK Wil. Sulawesi

Dalam rangka melaksanakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 374 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Keputusan Ditjen Gakkum KLHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Ditjen Gakkum KLHK Tahun 2020-2024 dengan penyusunan rencana kerja dan rencana aksi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan dan1 (satu) agenda quick wins, yaitu:

1. Manajemen perubahan;
2. Deregulasi kebijakan;
3. Penataan organisasi kelembagaan;
4. Penataan tata laksana;
5. Sistem manajemen sumber daya manusia;
6. Penguatan akuntabilitas;
7. Pengawasan;
8. Pelayanan publik; serta
9. Program quick wins.

Setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta melakukan adaptasi, menyusun rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi/ zona integritas, dan melaksanakan rencana aksi dimaksud.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen penguatan sistem tata kelola dan kelembagaan serta pembangunan zona integritas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara masif di lingkungan kerja masing-masing sebagaimana dimandatkan oleh Instruksi Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Kementerian LHK.

Namun demikian, yang jauh lebih penting dari agenda pembangunan zona integritas adalah bagaimana seluruh komponen yang ada di setiap unit kerja dapat terus menjaga komitmen perubahannya dan berkolaborasi dalam upaya perbaikan tata kelola.

II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN ANGGARAN

FIGHT AGAINST X-CRIME

A. Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022

Sesuai dengan **Laporan Kinerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi**, Capaian Kinerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Operasi Pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	4 Operasi	31 Operasi	150%
		Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar	4 Operasi	20 Operasi	150%
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang	160 Orang	150%
2.	Meningkatnya pelaku Usaha/kegiatan terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	80 Badan Usaha	90 Badan Usaha	113%
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	6 Orang	120%
3.	Meningkatnya Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	19 Perkara	28 Perkara	148%
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya	4 Orang	8 Orang	150%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100%
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA					**150%**

B. Capaian Prognosis Tahun 2022

Berdasarkan data SAKTI dan OMSPAN, berikut merupakan nilai pagu dan realisasi BPPHLHK Wilayah Sulawesi tahun 2022:

Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	1,711,513,000	1,711,255,052	99,98
Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan & Satwa Liar	2,666,590,000	2,644,634,120	99,18
Peningkatan Kapasitas POLHUT	229,879,000	229,791,660	99,96
Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	2,096,769,000	2,082,309,458	99,31
PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	50,000,000	48,958,204	99,92
Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	3,940,561,000	3,938,389,820	99,94
Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya	551.100.000	483,908,936	99,70
Layanan Perkantoran	23,835,737,000	23,829,974,889	99,98
Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,000,0000,0000	998,036,818	99,80
TOTAL	**36.016.442.000**	**35,986,654,801**	**99,92**

Berdasarkan proporsi/jenis anggaran, alokasi belanja modal merupakan alokasi tertinggi berdasarkan jenis belanja yaitu sebesar 70% dilanjutkan belanja barang 15% dan belanja pegawai 15%. Penyerapan anggaran tertinggi berada pada jenis belanja pegawai sebesar 100% selanjutnya belanja modal 99,98% dan belanja barang 99,80%.

III. RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Rencana Kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2023 selaras pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut dipilih berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) yang mempertajam prioritas nasional, program prioritas dan Major Project, serta memperkuat komunikasi dengan pelaku pembangunan. Arah kebijakan prioritas pembangunan di 2023 meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, Pembangunan Rendah Karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Negara.

Lima poin penting dalam *Kick-Off Meeting* RKP 2023. *Pertama*, sasaran dan prioritas pembangunan RKP 2023 menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan RKA K/L dan RKPD. *Kedua*, pentingnya sinergi perencanaan pembangunan antara Renja K/L serta RKPD dengan RKP 2023. *Ketiga*, perencanaan dan anggaran yang disusun K/L dan pemerintah daerah harus terukur, imperatif dan sesuai dengan amanat presiden “*making delivered*”, diperkuat melalui mekanisme *Clearing House* dengan menerapkan prinsip Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). *Keempat*, memperkuat integrasi dan sinergi sumber pendanaan yang mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas, yaitu pendanaan swasta, KPBU, BUMN, dan APBN sebagai sumber terakhir yang digunakan. *Kelima*, K/L dan pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan pelaksanaan *Major Project* dan didukung sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang andal.

TEMA RKP Tahun 2023

Peningkatan Produktivitas untuk Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Prioritas Nasional 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Prioritas Nasional 2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meniamin Pemerataan

Prioritas Nasional 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan bersaing

Prioritas Nasional 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Prioritas Nasional 5

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Prioritas Nasional 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Prioritas Nasional 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

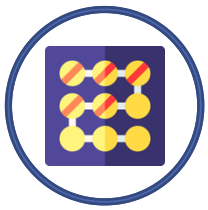

Isu- Isu Strategis Lingkungan Hidup, Bencana, Perubahan Iklim

Deplesi SDA dan Degradasi Kualitas LH
Daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungnan hidup semakin menurun

Pelanggaran Hukum SDA dan LH
Modus pelanggaran hukum SDA dan LH semakin beragam disekluruh wilayah

Kerentanan dan Risiko Bencana
Risiko dan kerentanan terhadap bencana hidrometeorologis, tektonis, geologis, serta bencana lingkungan masunh tinggi

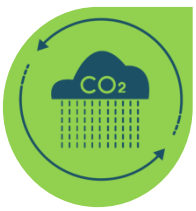

Peningkatan Emisi GRK
Penurunan emisi GRK sesuai komitmen nasional masih sulit tercapai

Bahaya Perubahan Iklim
Peristiwa iklim ekstrim semakin sering terjadi akibat dampak perubahan iklim

Balai pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi telah merencanakan beberapa target prioritas penganan kasus dan perkara di tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari kinerja tahun 2022, diantaranya:

1. Pembalakan Liar
2. Pertambangan Ilegal
3. Perambahan Kawasan Hutan
4. Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Tumbuhan dan Satwa Liar

B. Prioritas Nasional Tahun 2023

Prioritas Nasional lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Prioritas Nasional

Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan

Program Prioritas :

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan Prioritas :

Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pro- PN	Rincian Output	Target	Anggaran
Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (029.FF)			
01 - Penguatan Sistem Perizinan Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan SDA dan LH	001 - Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	7 Operasi	3.400.000.000
	002 - Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	4 Operasi	
	003 - Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	15 orang	
Program : Kualitas Lingkungan Hidup (029.FD)			
02 - Penegakan Hukum di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	001 - Jumlah Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	87 Badan Usaha	10.946.423.000
	002 - Kasus Tindak Pidana LHK P21	28 Perkara	
	003 - Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	10 orang	
Total Anggaran Prioritas Nasional TA. 2023			14.346.423.000

C. Non Prioritas Nasional Tahun 2023

Non Prioritas Nasional adalah Output Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak termasuk di dalam Prioritas Nasional di Tahun 2023. Namun Prioritas bidang ini merupakan Daftar Kegiatan yang terpisah dari Prioritas Nasional RKP tahun 2023 tetapi menjadi bagian dari bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan terlaksana di tahun 2023.

Rincian Output	Target	Anggaran
Program : Dukungan Manajemen		
01 - Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis	1 Layanan	26.006.944.000
02 - Layanan Umum	1 Layanan	950.000.000
Total Anggaran Non Prioritas Bidang TA. 2023		26.956.944.000

D. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023 total anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi untuk Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari DIPA BA 029 adalah sebesar Rp.41.303.367.000,- (empat puluh satu milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Kode Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Pagu (Rp)
5427.EBA	Layanan Umum	950.000.000
5427.EBA	Layanan Perkantoran	26.006.944.000
5428.QHD	Operasi Bidang Keamanan	3.200.000.000
5428.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	200.000.000
5430.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	3.300.000.000
5430.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100.000.000
5431.QCE	Penanganan Perkara	7.526.423.000
5431.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.000.000
JUMLAH		**41.303.367.000**

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2023 perlu dilaksanakan dan dikawal bersama seiring Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan memperhatikan protokol Kesehatan. Renja 2023 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2022, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2023.

Renja ini memuat berbagai upaya dan keberhasilan Ditjen Gakkum LHK dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2023 dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategi LHK tahun 2020 s.d 2024, Rencana Strategi Ditjen Gakkum LHK tahun 2020 s.d 2024 serta Rencana Strategi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2020 s.d 2024 dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapat target dan sasaran yang telah di tetapkan. Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit Kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal LHK diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja dan LAKIP KLHK di tahun 2023.

Lampiran 1 – Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Lokasi Kegiatan	Target 2023	Anggaran
Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Gorontalo	7 Operasi	1.250.000.000
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan	Operasi Peredaran Hasil Hutan		4 Operasi	1.950.000.000
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Makassar, Palu, Manado dan Jakarta	15 Orang	200.000.000
Total						3.400.000.000

Lampiran 2 – Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Lokasi Kegiatan	Target 2021	Anggaran
Terawasinya Usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundangan undangan terkait bidang LHK	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Jumlah Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan usaha	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Gorontalo	87 Badan Usaha	3.300.000.000
		JumlahPPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas PPLH	Makassar, Palu, Manado dan Jakarta	10 Orang	100.000.000
Total						3.400.000.000

Lampiran 3 – Kegiatan Penegakan Hukum Pidana dan LHK

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Lokasi Kegiatan	Target 2021	Anggaran
Terselesaikannya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan P-21	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	Kasus Tindak Pidana LHK P.21	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Gorontalo	28 Perkara	7.526.423.000
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas PPNS	Makassar, Palu, Manado dan Jakarta	5 Orang	20.000.000
Total						5.524.000.000

Lampiran 4 – Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Gakkum LHK

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Lokasi Kegiatan	Target 2021	Anggaran
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dilingkungan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis	Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis	Makassar	1 Layanan	26.006.944.000
		Layanan Umum	Layanan Umum	Makassar	1 Layanan	950.000.000
Total						26.956.944.000